



Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited)

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 16 Januari 2025
Kepala BPKIL Serang

Toha Tusihadi
NIP. 197112121997011001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	15
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.3 Piutang Bukan Pajak	
C.4 Persediaan	
C.5 Properti Investasi	
C.6 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	
C.7 Tanah	
C.8 Peralatan dan Mesin	
C.9 Gedung dan Bangunan	
C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.11 Aset Tetap Lainnya	
C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.14 Aset Tak Berwujud	
C.15 Aset Lain-lain	
C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.17 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.18 Pendapatan Diterima Dimuka	
C.19 Uang Muka dari KPPN	
C.21 Ekuitas	
Catatan Penting Lainnya neraca	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	20
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	

D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.9	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	24
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.4	Transaksi Antar Entitas	
E.5	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	24
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Serang, 16 Januari 2025
Kepala BPKL Serang

Taha Tushadi
NRP. NIP 197112121997011001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.224.279.457 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.224.279.457 atau mencapai 111,30 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.100.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.326.610.599 atau mencapai 99,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp13.329.389.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp52.038.344.672 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp335.741.653; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp51.648.050.902 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp54.552.117.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp237.602.006 dan Rp79.715.383.698

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.697.341.070 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16.460.332.048 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-14.762.990.978, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp54.465.099 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14.708.525.879.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp82.266.342.830, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-14.708.525.879 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 56.572.889 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 12.102.331.142 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp79.716.720.982

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 04

SATUAN KERJA : BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG 567800

Tgl Data : 27/02/25 9:07 AM

Tgl Cetak : 27/02/25 12:49 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13,329,389,000	13,326,610,599	(2,778,401)	99.98	14,679,894,000	14,605,499,623	74,394,377	99.49
C. PEMBAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (567800) BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Tgl Data : 27/02/25 9:07 AM
Tgl Cetak : 27/02/25 12:50 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,697,341,070	1,998,174,500	(300,833,430)	(15.055)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,697,341,070	1,998,174,500	(300,833,430)	(15.055)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,697,341,070	1,998,174,500	(300,833,430)	(15.055)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,697,594,829	4,851,772,381	845,822,448	17.433
Beban Persediaan	1,808,659,990	1,957,924,052	(149,264,062)	(7.624)
Beban Barang dan Jasa	3,653,553,990	3,738,606,708	(85,052,718)	(2.275)
Beban Pemeliharaan	1,392,613,913	2,365,331,333	(972,717,420)	(41.124)
Beban Perjalanan Dinas	1,125,282,496	1,105,411,292	19,871,204	1.798
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (567800) BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Tgl Data : 27/02/25 9:07 AM
Tgl Cetak : 27/02/25 12:50 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,782,546,270	2,667,560,655	114,985,615	4.311
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	16,460,251,488	16,686,606,421	(226,354,933)	(1.357)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14,762,910,418)	(14,688,431,921)	(74,478,497)	0.507
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	54,465,000	(108,795,809)	163,260,809	(150.06 2)
Pendapatan Pelepasan Aset	54,465,000	64,999,999	(10,534,999)	(16.208)
Beban Pelepasan Aset	0	173,795,808	(173,795,808)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,583,103	984,830	1,598,273	162.289
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,920,387	984,830	2,935,557	298.078
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,337,284	0	1,337,284	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	57,048,103	(107,810,979)	164,859,082	(152.91 5)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14,705,862,315)	(14,796,242,900)	90,380,585	(0.611)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(14,705,862,315)	(14,796,242,900)	90,380,585	(0.611)

Keterangan :

FINAL



Kab Serang, 27 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan

DRH TOHA TUSIHADI
NIP. 197411172000031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (567800) BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Tgl Data : 27/02/25 6:24 AM
 Tgl Cetak : 27/02/25 12:50 PM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	82,266,342,830	76,243,620,450	6,022,722,380	7.9
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,705,862,315)	(14,796,242,900)	90,380,585	(0.61)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	56,572,889	(503,221,610)	559,794,499	(111.24)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	56,572,889	(503,221,610)	559,794,499	(111.24)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,102,331,142	21,322,186,890	(9,219,855,748)	(43.24)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,546,958,284)	6,022,722,380	(8,569,680,664)	(142.29)
EKUITAS AKHIR	79,719,384,546	82,266,342,830	(2,546,958,284)	(3.1)

Keterangan :
 FINAL

Kab Serang, 27 Februari 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan
 Lingkungan Serang

DRH TOHA TUSIHADI
 NIP. 197411172000031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (567800) BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Tgl Data : 27/02/25 9:07 AM

Tgl Cetak : 27/02/25 12:50 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	335,741,653	691,092,024	(355,350,371)	(51.42)
JUMLAH ASET LANCAR	335,741,653	691,092,024	(355,350,371)	(51.42)
ASET TETAP				
Tanah	26,936,432,000	26,936,432,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	46,891,969,871	46,586,794,871	305,175,000	0.66
Gedung dan Bangunan	21,395,700,336	21,357,981,219	37,719,117	0.18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	974,504,000	798,439,000	176,065,000	22.05
Aset Tetap Lainnya	5,769,670	5,769,670	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(44,556,324,975)	(41,853,632,513)	(2,702,692,462)	6.46
JUMLAH ASET TETAP	51,648,050,902	53,831,784,247	(2,183,733,345)	(4.06)
Properti Investasi				
Properti Investasi	32,435,545,000	32,435,545,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(4,516,903,120)	(4,077,723,932)	(439,179,188)	10.77
JUMLAH Properti Investasi	27,918,641,880	28,357,821,068	(439,179,188)	(1.55)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	174,293,389	174,293,389	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(119,741,272)	(115,740,424)	(4,000,848)	3.46
JUMLAH ASET LAINNYA	54,552,117	58,552,965	(4,000,848)	(6.83)
JUMLAH ASET	79,956,986,552	82,939,250,304	(2,982,263,752)	(3.60)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	148,937,506	52,255,974	96,681,532	185.02
Pendapatan Diterima Dimuka	88,664,500	620,651,500	(531,987,000)	(85.71)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	237,602,006	672,907,474	(435,305,468)	(64.69)
JUMLAH KEWAJIBAN	237,602,006	672,907,474	(435,305,468)	(64.69)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	79,719,384,546	82,266,342,830	(2,546,958,284)	(3.10)
JUMLAH EKUITAS	79,719,384,546	82,266,342,830	(2,546,958,284)	(3.10)
JUMLAH EKUITAS	79,719,384,546	82,266,342,830	(2,546,958,284)	(3.10)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	79,956,986,552	82,939,250,304	(2,982,263,752)	(3.60)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (567800) BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Tgl Data : 27/02/25 9:07 AM
Tgl Cetak : 27/02/25 12:50 PM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Kab Serang, 27 Februari 2025
Penasihat Ahli Jawab UAKPA
Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan



NIP. 197411172000031003

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 67/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengujian hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- b. penyiapan metode uji hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- c. pengujian penapisan dan konfirmasi hama dan penyakit ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan uji profisiensi penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan surveilan, monitoring, deteksi dini, dan penanganan penyakit ikan;
- f. pengujian kelayakan mutu, khasiat, dan keamanan obat ikan;
- g. pelaksanaan surveilan pakan dan obat ikan;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- i. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 67/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengujian hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- b. penyiapan metode uji hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- c. pengujian penapisan dan konfirmasi hama dan penyakit ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan uji profisiensi penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan surveilan, monitoring, deteksi dini, dan penanganan penyakit ikan;
- f. pengujian kelayakan mutu, khasiat, dan keamanan obat ikan;
- g. pelaksanaan surveilan pakan dan obat ikan;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- i. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.100.000.000	1.100.000.000
Jumlah Pendapatan	1.100.000.000	1.100.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.373.160.000	5.698.872.000
Belanja Barang	7.425.517.000	7.530.517.000
Belanja Modal	100.000.000	100.000.000
Jumlah Belanja	12.898.677.000	13.329.389.000

Realisasi Pendapatan
Rp1.224.279.457

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.224.279.457 atau mencapai 111,30 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000. Pendapatan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.224.279.457. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan Pendapatan jasa pengujian laboratorium dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.100.000.000	1.224.279.457	111,30
Jumlah	1.100.000.000	1.224.279.457	111,30

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 20,10 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.224.279.457	1.532.172.329	(20,10)
Jumlah	1.224.279.457	1.532.172.329	(20,10)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.224.279.457 dan Rp1.532.172.329. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar 20,10 dari TA 2023 Penurunan Pendapatan jasa pengujian laboratorium. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.224.279.457	1.532.172.329	(20,10)
Jumlah	1.224.279.457	1.532.172.329	(20,10)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	635.070	5.072.500	(87,48)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	54.465.000	64.999.999	(16,21)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	23.808.000	98.811.000	(75,91)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	45.425.000	48.978.000	(7,25)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.095.486.000	1.313.326.000	(16,59)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	99	984.830	(99,99)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.460.288	-	-
Jumlah	1.224.279.457	1.532.172.329	(20,10)

B.2 Belanja

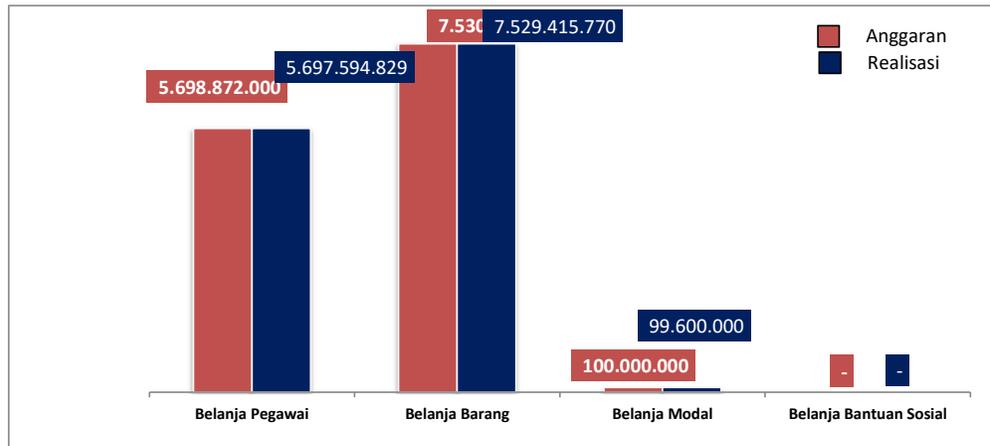
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp13.326.610.599 atau 99,98 % dari anggaran belanja sebesar Rp.13.329.389.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	5.698.872.000	5.697.594.829	99,98
Belanja Barang	7.530.517.000	7.529.415.770	99,99
Belanja Modal	100.000.000	99.600.000	99,60
Jumlah	13.329.389.000	13.326.610.599	99,98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 8,76% Percepatan proses Pengadaan barang dan jasa serta penambahan pegawai PPPK. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	5.697.594.829	4.851.772.381	17,43
Belanja Barang	7.529.415.770	9.146.508.602	(17,68)
Belanja Modal	99.600.000	607.218.640	(83,60)
Jumlah	13.326.610.599	14.605.499.623	(8,76)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.697.594.829 dan Rp4.851.772.381. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,43 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan adanya pegawai PPPK baru

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.908.551.700	1.739.656.500	9,71
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.186	28.018	4,17
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	149.236.920	136.470.420	9,35
Belanja Tunj. Anak PNS	44.953.884	39.586.001	13,56
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	63.080.000	133.945.000	(52,91)
Belanja Tunj. PPh PNS	12.987.924	2.262.565	474,04
Belanja Tunj. Beras PNS	105.371.100	105.878.040	(0,48)
Belanja Uang Makan PNS	225.089.000	242.846.000	(7,31)
Belanja Tunjangan Umum PNS	22.385.000	24.955.000	(10,30)
Belanja Uang Lembur	51.670.000	41.012.000	25,99
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.727.894.492	2.360.311.449	15,57
Jumlah Belanja kotor	5.698.765.717	4.852.150.993	17,45
Pengembalian Belanja Pegawai	1.170.888	378.612	209,26
Jumlah Belanja	5.697.594.829	4.851.772.381	17,43

Realisasi Belanja
Barang
Rp7.529.415.770

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.529.415.770 dan Rp9.146.508.602. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 17,68% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan pagu anggaran belanja barang

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	715.427.916	1.378.975.014	(48,12)
Belanja Barang Non Operasional	883.368.870	1.072.750.192	(17,65)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.432.862.503	1.928.492.553	(25,70)
Belanja Jasa	1.958.075.672	1.282.460.068	52,68
Belanja Pemeliharaan	1.414.398.313	2.378.419.483	(40,53)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.125.582.496	1.105.411.292	1,82
Jumlah Belanja Kotor	7.529.715.770	9.146.508.602	(17,68)
Pengembalian Belanja	300.000	-	-
Jumlah Belanja	7.529.415.770	9.146.508.602	(17,68)

Realisasi Belanja Modal
Rp99.600.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp99.600.000 dan Rp607.218.640. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 83,60% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Penurunan Pagu Anggaran Belanja Modal (53).

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.600.000	607.218.640	(83,60)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	99.600.000	607.218.640	(83,60)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	99.600.000	607.218.640	(83,60)

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp99.600.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp99.600.000 dan Rp607.218.640, mengalami penurunan sebesar 83,60 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Penurunan Pagu Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.600.000	607.218.640	(83,60)
Jumlah Belanja Kotor	99.600.000	607.218.640	(83,60)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	99.600.000	607.218.640	(83,60)

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Persediaan
Rp335.741.653

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp335.741.653 dan Rp691.092.024. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	328.831.553	668.820.264
Bahan untuk Pemeliharaan	142.900	406.800
Bahan Baku	6.767.200	21.864.960
Jumlah	335.741.653	691.092.024

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan pada satker BPKIL berupa Bahan Pengujian Laboratorium, ATK, bahan komputer dan bahan kebersihan kantor

Properti Investasi
Rp32.435.545.000

C.4 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp32.435.545.000 dan Rp32.435.545.000. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	32.435.545.000	32.435.545.000
-	(4.516.903.120)	(4.077.723.932)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	27.918.641.880	28.357.821.068

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi
Rp4.516.903.120

C.5 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp-4.516.903.120 dan Rp-4.077.723.932. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah
Rp26.936.432.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp26.936.432.000 dan Rp26.936.432.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	26.936.432.000
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Desember 2024	26.936.432.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	59.300	Jl. Raya Carita Ds. Umbul Tanjung Kec. Cinangka	26.936.432.000
Jumlah			26.936.432.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau bangunan yaitu pihak ketiga yaitu:

1. PT Tri Karta Pratama Menyewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau bangunan yang beralamat di JL. Desa Pejamben Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten seluas 30.000 M2 dengan surat perjanjian No.572/LP2IL/KU.340/III/2020 senilai Rp1.686.135.000 selama 5 Tahun Terhitung tgl 2 Maret 2020 s.d 2 Maret 2025
2. PT.Suri Tani Pemuka Menyewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau bangunan yang beralamat di Desa Banjarmasin Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten seluas 20.001 M2 dengan surat perjanjian No.605/LP2IL/KU.340/III/2020 senilai Rp973.800.000 selama 5 Tahun terhitung tgl 5 Maret 2020 s.d 5 Maret 2025

Peralatan dan Mesin
Rp46.891.969.871

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp46.891.969.871 dan Rp46.586.794.871. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	46.586.794.871
Mutasi tambah:	
Pembelian	99.599.997
Transfer Masuk	205.574.960
Reklasifikasi Masuk	28.711.299
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	28.711.379
Saldo per 31 Desember 2024	46.891.969.748
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(40.473.404.691)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6.418.565.057

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pembelian Perangkat Pengolah data senilai Rp 99.600.000 dan transfer masuk berupa kursi dan meja kantor senilai 205.574.960 dan Reklasifikasi masuk koreksi kode barang laptop case

Gedung dan Bangunan
Rp21.395.700.336

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp21.395.700.336 dan Rp21.357.981.219. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	21.357.981.219
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	37.719.116
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	21.395.700.335
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.383.169.019)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	18.012.531.316

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp974.504.000

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.974.504.000 dan Rp.798.439.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	798.439.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	176.064.999
Mutasi Kurang:	
Saldo per	974.503.999
Akumulasi Penyusutan s.d.	(699.751.265)
Nilai Buku per	274.752.734

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Kapitalisasi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan senilai Rp 176.604.999

Aset Tetap Lainnya
Rp5.769.670

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.5.769.670 dan Rp.5.769.670. Aset tetap tersebut Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	5.769.670
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	5.769.670
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.769.670

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp44.556.324.975

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp44.556.324.975 dan Rp41.853.632.513. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	46.891.969.871	(40.473.404.691)	6.418.565.180
2	Gedung dan Bangunan	21.395.700.336	(3.383.169.019)	18.012.531.317
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	974.504.000	(699.751.265)	274.752.735
4	Aset Tetap Lainnya	5.769.670	-	5.769.670
Akumulasi Penyusutan		69.267.943.877	(44.556.324.975)	24.711.618.902

Aset Tak Berwujud
Rp174.293.389

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp174.293.389 dan Rp174.293.389. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang berupa Software

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	174.293.389
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	174.293.389
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(119.741.272)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	54.552.117

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 119.741.272

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp119.741.272 dan Rp115.740.424. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	174.293.389	(119.741.272)	54.552.117
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	174.293.389	(119.741.272)	54.552.117

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp148.937.506

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp148.937.506 dan Rp52.255.974. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	148.937.506	52.255.974
	-	-
	-	-
	-	-
Total	148.937.506	52.255.974

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

transaksi akrual dalam proses pembayaran pada SAKTI modul komitmen dan Pembayaran

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp88.664.500

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp88.664.500 dan Rp620.651.500. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2023
	88.664.500	620.651.500
	-	-
	-	-
	-	-
Total	88.664.500	620.651.500

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari Tanah dan Bangunan yang disewakan selama lima tahun dengan pembayaran di awal kontrak

Ekuitas
Rp79.715.383.698

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp79.715.383.698. dan Rp82.266.342.830. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan Penting Lainnya neraca

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.697.341.070

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.697.341.070 dan Rp1.998.174.500. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 15,06. Hal tersebut disebabkan oleh PNBPFungsional BPKIL Serang bersumber dari Jasa Pengujian Laboratorium, Penjualan ikan dari sisa penguasaan obat ikan dan pendapatan dari pemanfaatan Aset berupa sewa Asrama dan Rumah Dinas.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,	635.070	5.072.500,00	(87,48)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	555.795.000	630.798.000,00	(11,89)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	45.425.000	48.978.000,00	(7,25)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	1.095.486.000	1.313.326.000,00	(16,59)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	-	-	-
Jumlah	1.697.341.070,00	1.998.174.500,00	(15,06)

Beban Pegawai
Rp5.697.594.829

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.697.594.829 dan Rp4.851.772.381.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 17,43 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya Pegawai PPPK baru berjumlah 4 orang. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	1.908.297.000	1.739.278.100	9,72
	27.998	27.806	0,69
	149.236.920	136.470.420	9,35
	44.953.884	39.586.001	13,56
	25.200.000	25.200.000	-
	62.905.000	133.945.000	(53,04)
	12.987.924	2.262.565	474,04
Jumlah	5.697.594.829	4.851.772.381	17,43

Beban Persediaan
Rp1.808.659.990

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.808.659.990 dan Rp1.957.924.052

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,62 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan beban persediaan dikarenakan percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	1.793.562.230	1.770.328.892	1,31
	15.097.760	187.595.160	(91,95)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1.808.659.990,00	1.957.924.052	(7,62)

Beban Barang dan Jasa
Rp3.653.553.990

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.653.553.990 dan Rp3.738.606.708.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,27 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	478.292.861	1.075.833.890	(55,54)
	137.454.408	150.251.598	(8,52)
	11.843.147	9.676.026	22,40
	77.862.000	131.952.000	(40,99)
	9.975.500	11.261.500	(11,42)
	507.438.870	763.375.192	(33,53)
	375.930.000	309.375.000	21,51
	739.111.574	652.267.426	13,31
	13.912.754	14.346.471	(3,02)
Jumlah	3.653.553.990	3.738.606.708,00	(2,27)

Beban Pemeliharaan
Rp1.392.613.913

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.392.613.913 dan Rp2.365.331.333.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 41,12 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan karena percepatan proses pengadaan barang dan jasa Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	400.450.311	869.453.180	(53,94)
	722.289.913	1.120.733.273	(35,55)
	176.605.000	171.580.000	2,93
	93.004.789	190.122.830	(51,08)
Jumlah	1.392.613.913	2.365.331.333	(41,12)

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.125.282.496

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.125.282.496 dan Rp1.105.411.292

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,80 persen disebabkan oleh Kegiatan monitoring pengambilan sampel laboratorium dan dukungan manajemen banyak dilakukan pada semester 1 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
	997.782.496	1.045.411.292	(4,56)
	127.500.000	60.000.000	112,50
Jumlah	1.125.282.496,00	1.105.411.292	1,80

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.786.547.118

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.786.547.118 dan Rp2.667.560.655.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	1.796.712.178	1.705.082.718	5,37
	471.914.593	690.710.095	(31,68)
	59.875.485	36.400.151	64,49
	1.904.003	4.817.693	(60,48)
	8.959.975	8.959.975	-
	443.180.036	219.589.599	101,82
Jumlah	2.782.546.270	2.665.560.231	4,39

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp54.465.000

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54.465.000 dan Rp-108.795.809

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	(173.795.808,00)	(100)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	54.465.000	64.999.999,00	(16)
Jumlah	54.465.000,00	(108.795.809)	(150)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp82.266.342.830,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.82.266.342.830,00 dan Rp.76.243.620.450,00

Defisit LO
Rp.14.708.525.879,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.14.708.525.879,00 dan Rp.14.796.242.900,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp12.102.331.142

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12.102.331.142 dan Rp.21.322.186.890. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.326.610.599
Diterima dari Entitas Lain	(1.224.279.457)
Jumlah	12.102.331.142

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 13.326.610.599, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1.224.279.457

Ekuitas Akhir
Rp79.716.720.982

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.79.716.720.982,00 dan Rp.82.266.342.830,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Terdapat Program Prioritas Nasional I - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan pada DIPA Satker BPKIL Serang yang terdiri dari 3 Rincian Output yaitu, Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR)/ Surveilans Antimicrobial Use (AMU) yang diuji, Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan, dan Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan dengan pagu anggaran sebesar Rp 659.382.000 dan Realisasi sebesar Rp 658.892.797 (99,93%) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
BPKIL Serang	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang diuji	109.382.000	109.325.376	99,95%	Sampel	124	647	522%
	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	200.000.000	199.926.807	99,96%	Unit	1	1	100%
	Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan - IISAP	350.000.000	349.640.614	99,90%	unit	1	1	100%
Jumlah		659.382.000	658.892.797	99,93%				

Daftar Revisi DIPA BPKIL Serang Tahun Anggaran 2024

1. Revisi Buka Blokir Belanja 53 pada tanggal 25 Januari 2024 Pagu Rp. 12.898.677.000
2. Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 20 Februari 2024 Pagu Rp. 12.898.677.000
3. Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 19 April 2024 Pagu Rp. 12.898.677.000
4. Revisi Buka Blokir Belanja 52 pada tanggal 02 Mei 2024 Pagu Rp. 12.898.677.000
5. Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 11 Juli 2024 Pagu Rp. 12.898.677.000
6. Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 11 Oktober 2024 Pagu Rp. 12.898.677.000
7. Revisi Penambahan Pagu Belanja Pegawai pada tanggal 29 Oktober 2024 Pagu Rp. 13.224.389.000
8. Revisi Penambahan Pagu Belanja Barang pada tanggal 05 November 2024 Pagu Rp. 13.329.389.000
9. Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 08 November 2024 Pagu Rp. 13.329.389.000
10. Revisi Pemuktahiran KPA pada tanggal 08 November 2024 Pagu Rp. 13.329.389.000
11. Revisi Pemuktahiran KPA pada tanggal 28 November 2024 Pagu Rp. 13.329.389.000
12. Revisi Pemuktahiran KPA pada tanggal 04 Desember 2024 Pagu Rp. 13.329.389.000
13. Revisi Pemuktahiran KPA pada tanggal 27 Desember 2024 Pagu Rp. 13.329.389.000